

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Stabilitas keuangan global sedang menghadapi tantangan karena pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 yang tidak merata. Menurut laporan (*Internasional Monetary Fund*, 2021) menunjukkan bahwa pemulihan yang bersifat asinkron di berbagai negara, di mana beberapa negara mengalami pemulihan lebih cepat sementara yang lain tertinggal, telah meningkatkan risiko ketidakstabilan di pasar keuangan. Perbedaan ini menciptakan ketidakseimbangan antara sektor-sektor yang lebih kuat dan yang masih rentan, sehingga berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi. Situasi ini semakin penting bagi perusahaan untuk memperhatikan stabilitas keuangan termasuk perusahaan industri farmasi.

(Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2021) menyatakan bahwa industri farmasi merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035, industri farmasi ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh industri prioritas, karena merupakan industri manufaktur non-migas yang menyumbang kontribusi terbesar keempat kepada ekonomi Indonesia.

Dewi & Kencana (2022) mengungkapkan produksi suplemen, multivitamin, dan obat-obatan untuk memenuhi permintaan selama pandemi Covid-19 meningkat sebesar 5.69% pada kuartal III/2020 dibandingkan kuartal II/2020, menurut data

yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal menyebabkan kontribusi industri ini juga naik menjadi sekitar 10,7%. Oleh karena itulah industri farmasi dimasukkan ke dalam industri strategis yang menjadi fokus pengembangan sektor industri pengolahan secara keseluruhan. Namun menurut Christianingrum & Mujiburrahman (2021) selama setengah dekade RIPIN, industri farmasi masih menghadapi dinamika yang sangat kompleks. Industri farmasi masih tergantung pada bahan baku obat dari luar negeri. Sejumlah besar perusahaan relatif masih fokus pada produk hilir.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (2021) sejalan dengan meningkatnya peran industri farmasi, ekspor industri farmasi Indonesia termasuk produk obat kimia dan obat tradisional, meningkat 2,68% dalam periode 2018-2020, dengan nilai ekspor mencapai USD 635,3 juta pada 2020. Namun, volume ekspor turun 7,02% dalam periode yang sama. Lima negara terbesar tujuan ekspor adalah Singapura, Jepang, Filipina, India, dan Thailand, yang menyumbang 58% dari total ekspor. Sementara itu, perkembangan tren impor industri farmasi juga mengalami peningkatan selama 2018 – 2020 secara nilai, akan tetapi mengalami penurunan secara volume pada periode tersebut. Dengan nilai impor yang naik sedangkan secara volume turun, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga produk-produk farmasi yang diduga dikarenakan kelangkaan barang selama pandemi COVID-19 seiring meningkatnya permintaan terhadap obat-obatan dan suplemen kesehatan. Ketimpangan antara nilai ekspor dan nilai impor Industri Farmasi di mana nilai impor lebih besar daripada eksportnya, hal ini menyebabkan neraca perdagangan Industri Farmasi

mengalami defisit dari tahun ke tahun. Tingginya ketergantungan bahan baku impor merupakan permasalahan penting yang dihadapi oleh industri farmasi di Indonesia. Diperkirakan sekitar 90-95% bahan baku industri farmasi nasional masih didatangkan dari luar negeri.

Realisasi investasi sektor farmasi masih menunjukkan perlambatan, baik investasi dalam bentuk PMA maupun PMDN. Perlambatan investasi asing pada sektor farmasi diprediksi akan berdampak pada semakin besar impor bahan baku obat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bidang kimia dasar harus menjadi fokus investasi di industri farmasi. Dalam tahun-tahun mendatang, pemerintah harus mendorong peningkatan investasi sektor farmasi dengan fokus pada pemenuhan ketersediaan bahan baku obat dalam negeri.

Meskipun industri farmasi dianggap strategis dan memainkan peran penting dalam ekonomi nasional, perusahaan farmasi di Indonesia menghadapi masalah besar karena penurunan investasi yang signifikan dan ketergantungan pada bahan baku impor. Beberapa di antaranya bahkan menghadapi masalah finansial yang signifikan. Sejumlah perusahaan farmasi mengalami penurunan kinerja keuangan hingga diambang kebangkrutan.

Dikri et al. (2022) mengungkapkan dalam penelitiannya berdasarkan analisis rasio keuangan perusahaan farmasi periode 2019–2021, di antara perusahaan lain Net Profit Margin (NPM) Indofarma menunjukkan nilai rata-rata negatif sebesar -0,078%. Bahkan pada tahun 2021, NPM Indofarma mencapai -0,821%, mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya

operasional yang lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan. Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan mengejutkan saat mengaudit kerugian PT Indofarma Tbk dan anak usahanya yang ternyata terjatuh pinjaman *online* alias pinjol. Sebelumnya, perusahaan juga menghadapi masalah keuangan karena dugaan *fraud* yang merugikan negara. Selain temuan lain yang berkaitan dengan tindakan Indofarma dan anak usahanya PT IGM, yang dianggap melakukan penipuan atau kerugian, temuan ini disampaikan oleh BPK kepada DPR (Puspadini, 2024).

Fenomena PT Indofarma Tbk ini telah diguncang oleh kombinasi strategi bisnis yang buruk dan tata kelola yang tidak efektif. Kondisi keuangan yang tidak stabil yang membuat restrukturisasi keuangan sendiri juga tidak cukup. Selain itu, diperlukan peningkatan mendalam dalam manajemen organisasi dan sumber daya manusia.

Tidak hanya PT Indofarma, dalam penelitian (M. F. Ramadhan & Kusuma, 2024) menyatakan bahwa PT Kimia Farma tidak mampu mempertahankan kinerja keuangannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan menurunnya EBIT periode 2021-2023, bahkan pada tahun 2023 menyentuh angka Rp - 1,54 triliun. Pada tahun 2022 total aset Kimia Farma sebesar Rp 20,3 triliun, turun signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp 17,5 triliun, penurunan tersebut pun berdampak pada kerugian laba tahun 2023. Penjualan PT Kimia Farma menurun pada tahun 2022 yang mengakibatkan perusahaan mencatatkan rugi sebesar Rp 190 miliar. Meskipun penjualan naik sebesar 7,93% pada tahun 2023, perusahaan masih mencatatkan kerugian sebesar Rp 1,48 triliun, bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Menurut Fadila (2024) PT Kimia Farma menghadapi masalah serius setelah ditemukan indikasi pelanggaran integritas dalam pengumpulan informasi keuangannya oleh anak perusahaannya yaitu PT Kimia Farma Apotek. Pelanggaran ini berdampak signifikan terhadap sejumlah aspek keuangan perusahaan seperti pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban usaha yang secara total menyebabkan kerugian besar pada tahun 2023. Total kerugian konsolidasi Kimia Farma mencapai Rp 1,82 triliun pada periode tersebut. Selain itu terjadi peningkatan beban pokok penjualan sebesar 25.83%, yang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan yang hanya mencatat 7.93%. Fakta ini menunjukkan adanya ketidakmaksimalan dalam operasional perusahaan seperti penggunaan kapasitas pabrik yang tidak efisien serta kenaikan biaya bahan baku. Untuk memperbaiki kinerja, Kimia Farma Group merencanakan reorientasi bisnis di seluruh anak perusahaannya, termasuk optimalisasi fasilitas produksi, portofolio produk, kanal penjualan, strategi biaya, transformasi sumber daya manusia serta penguatan *good corporate governance*.

Kondisi keuangan Indofarma dan Kimia Farma menunjukkan betapa rentannya bisnis saat stabilitas keuangan terganggu. Dalam industri farmasi, stabilitas keuangan sangat penting untuk kelangsungan bisnis dan menghadapi risiko global yang semakin meningkat. Oleh karena itu, fokus pada stabilitas keuangan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa bisnis dapat bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak terduga.

Menurut (Gennad'evna, 2019) masalah dan tanggung jawab perusahaan yang sebenarnya adalah memastikan stabilitas keuangan dengan mempertimbangkan

faktor lingkungan. Stabilitas keuangan didefinisikan sebagai posisi keuangan perusahaan yang stabil, kemampuan perusahaan untuk beroperasi dan berkembang dengan sukses, dan keseimbangan yang konsisten antara dana sendiri dan pinjaman. Posisi keuangan yang stabil adalah hasil dari manajemen yang efektif dari semua komponen produksi dan ekonomi. Dalam suatu perusahaan, salah satu aspek penting laporan keuangan suatu perusahaan adalah menunjukkan kinerjanya selama periode waktu tertentu, seperti pendapatan, biaya, dan laba. Stabilitas kinerja keuangan dapat dilihat dari volatilitasnya pada perusahaan. Adapun ketidakstabilan keuangan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, termasuk risiko operasional, kredit, likuiditas, dan pasar. Ketidakstabilan sistem keuangan akan membahayakan dan menghambat kegiatan perekonomian dan perusahaan sehingga menyebabkan krisis atau kekurangan dana. Dalam hal ini, perusahaan akan membutuhkan biaya yang didistribusikan secara adil untuk mencegah kerugian karena ketidakstabilan sistem keuangan dan berdampak pada kepercayaan investor (Thoha et al., 2022).

Untuk menjaga stabilitas keuangan yang baik, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Salah satu pendekatan yang penting adalah melalui tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR). Menurut Untung (2009:1) dalam (Kholis, 2020) *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan

lingkungan. CSR ditetapkan dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Siueia et al., (2019) menyatakan bahwa komitmen perusahaan terhadap CSR dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor meningkatkan kepercayaan investor untuk terus berinvestasi sehingga manfaat keberlanjutan akan tercapai.

Dalam penelitian Maharani & Ferli (2023) Rata-rata pengungkapan CSR di sub-sektor farmasi tercatat sebesar 0,361 poin, dengan standar deviasi sebesar 0,117 poin. Ini berarti bahwa rata-rata perusahaan mengungkapkan 36,1% dari total 91 kriteria CSR selama 2017-2020. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya variasi dalam data pengungkapan CSR. Nilai minimum pengungkapan adalah 0,120, menandakan masih ada item yang belum diungkapkan, sementara nilai maksimum mencapai 0,527, mencerminkan upaya perusahaan dalam meningkatkan program CSR untuk kesejahteraan sosial dan lingkungan. Latifah & Widiatmoko (2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi keterlibatan perusahaan dalam kegiatan CSR, semakin positif pula citra yang diperoleh perusahaan di mata masyarakat dan investor. Investor cenderung tertarik pada perusahaan yang memiliki citra baik, yang dapat mendukung keberlanjutan perusahaan. CSR yang optimal tercermin saat total tanggung jawab sosial perusahaan melampaui 50%. Sebaliknya, CSR di bawah 50% menunjukkan rendahnya keterlibatan sosial perusahaan, yang dapat merusak citra di masyarakat dan mengurangi daya tarik bagi investor potensial.

Adapun perusahaan yang mengalami kerugian akibat lalainya dalam tanggung jawab sosial yaitu insiden pencemaran lingkungan yang melibatkan dua perusahaan farmasi di Teluk Jakarta terkait limbah paracetamol. Pemerintah DKI Jakarta mengidentifikasi PT MEF dan PT B sebagai sumber pencemaran, di mana pengelolaan air limbah di kedua perusahaan ini belum optimal. Akibatnya, keduanya diwajibkan memperbaiki sistem IPAL dan memperoleh izin teknis pembuangan air limbah. Jika tak dipenuhi, saluran IPAL mereka akan ditutup, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (A. B. Ramadhan, 2021).

Tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* juga merupakan salah satu strategi yang paling umum digunakan oleh perusahaan untuk menghindari kebangkrutan. Thoha et al. (2022) mengemukakan Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi menanamkan sahamnya pada perusahaan. Tata kelola yang baik pada suatu perusahaan akan meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan dan karyawan yang terlibat langsung dalam perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan perusahaan yang menguntungkan. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh nilai tambah dari laba yang tinggi. Pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, dewan direksi, dan komite audit.

Kepemilikan institusional adalah keadaan di mana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut meliputi institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Suwisma et al., 2023). Salah satu cara untuk mengurangi konflik agensi adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan

institusional memiliki kemampuan untuk mengontrol pihak manajemen melalui proses pengawasan yang efektif. institusional juga memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan (Deniza et al., 2023).

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran dewan direksi bertanggung jawab penuh atas jalannya dan pengelolaan perusahaan agar kepentingan perusahaan dapat terjaga dan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau melakukan tugas khusus, atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor mempertahankan independensi nya dari manajemen (Rismawandi, 2020). Dengan keberadaannya, ia dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan dan membantu mengoptimalkan sistem *checks and balances*. Pada akhirnya, ini akan memberikan perlindungan terbaik bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Orazalin et al. (2024) dan Ramzan et al. (2021) menyatakan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *financial stability*, namun berbeda dengan hasil penelitian dari Stefany & Agustina (2022) dan Wijaya et al., (2023) yang menyatakan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *financial stability*. Hasil lain ditemukan pada penelitian Khan et al., (2023) dan Hartati (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial stability*, sedangkan penelitian tidak sejalan dengan Khan et al. (2023), Hartati (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial stability*. Hasil lainnya ditemukan dalam penelitian Thoha et al. (2022), Afifah et al. (2024), yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap *financial stability* Namun penelitian Febrina & Sri (2022) dan (Intia & Azizah, 2021) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *financial stability*. Adapun penelitian (Khan et al., 2023) dan (Afifah et al., 2024) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *financial stability*, hal ini pula tidak sejalan dengan penelitian (Hartati, 2020) dan (Pramudityo & Sofie, 2023) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial stability*.

Berdasarkan hal tersebut berangkat dari fenomena, inkonsistensi hasil serta kesenjangan penelitian berdasarkan literatur yang ada. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang akan menguji “Pengaruh *Corporate social responsibility*, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, dan Komite Audit Terhadap *Financial stability* (Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Farmasi yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menekankan perusahaan farmasi sebagai industri strategis dan periode penelitian terbaru untuk menghasilkan hasil yang relevan dengan perkembangan terbaru.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, dan Komite Audit terhadap *Financial Stability* Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
2. Bagaimana *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, dan Komite Audit secara parsial terhadap *Financial Stability* Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
3. Bagaimana *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, dan Komite Audit secara simultan terhadap *Financial Stability* Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:

1. Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, dan Komite Audit terhadap *Financial Stability* Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, dan Komite Audit secara parsial terhadap *Financial Stability* Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, dan Komite Audit secara simultan terhadap *Financial Stability* Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama perkembangan ilmu akuntansi, serta dapat memberikan gambaran untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, dan Komite Audit terhadap *Financial Stability*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memperoleh pemahaman yang lebih mengenai

ilmu serta proses penelitian dan keterkaitan pembahasan masalah yang dibahas oleh penulis di bangku perkuliahan. Bagi Perusahaan dapat bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis terkait kebijakan CSR dan tata kelola perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih stabil khususnya pada perusahaan industri farmasi. Bagi investor berguna untuk mengukur risiko investasi, memilih perusahaan dengan tata kelola yang baik, serta memahami bagaimana praktik CSR dapat meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan. Ini dapat membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan bijak.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 dengan melakukan penelitian secara tidak langsung berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu *www.idx.co.id* dan situs *website* resmi masing-masing perusahaan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan September 2024, dengan jadwal penelitian terlampir.